

RENSTRA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026



BADAN PENGHUBUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan Daerah Perlu membutuhkan perencanaan strategis. Maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ikut mengemban tugas menyukseskan visi dan misi Gubernur.

Sejalan dengan tanggung jawab tersebut dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara, maka Badan Penghubung Daerah dengan tugas fungsi yang dimiliki dan berpedoman pada review RPJMD Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 tersebut, telah berhasil menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani dalam pencapaian kinerja organisasi. Sebagai dokumen tertulis yang memotret batang tubuh organisasi yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Rencana Program serta Kegiatan merupakan landasan terukur dan terarah bagi organisasi Badan Penghubung Daerah dalam bekerja dan menyusun program-program tahunan.

Dengan tugas dan fungsi utama adalah pelayanan, fasilitasi dan perwakilan Kalimantan Utara di Jakarta maka program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah menekankan pada peningkatan koordinasi dari pusat kedaerah maupun dari daerah kepusat dan fasilitasi dibidang promosi daerah. Akhirnya teriring harapan mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah ini dapat menjadi landasan baik kedalam yaitu unsur staf pelaksana yang ada di Badan Penghubung Daerah maupun keluar yakni kepada para stake holder. Diharapkan Renstra ini menjadi salah satu wujud implementasi dari pelaksanaan good governance dan adanya tanggungjawab instansi untuk membuat program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Jakarta, Juni 2021

Plt. Kepala Badan Penghubung,

Didik Supriyadi, A.Md
NIP. 19720918 199302 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	II-1
2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-8
2.3. Sarana dan Prasarana	II-12
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-25
2.5. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....	II-28
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penghubung.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	III-3
3.3. Telaahan Renstra K/L	III-7
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
 BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	IV-1
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1 Strategi Dan Kebijakan	V-1

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	VI-1
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
6.1	Indikator Kinerja	VI-3
6.2	Indikator Kinerja	VI-4
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan, kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara secara sistematis dan komprehensif dalam waktu 5 (lima) tahun, telah disusun kebijakan Jangka Menengah Daerah yang merupakan landasan arah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi. Dengan ditetapkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara maka, seluruh perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 272 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan, dan Rencana strategis

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara I - | 1

Perangkat dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan perangkat daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dan memberikan arah dalam perencanaan, pelaksanaan khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

1. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan merupakan penjabaran RPJMD ke dalam setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah;
2. Untuk acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen operasional tahunan di Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra
Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 050/0098/BAPP-LIT/GUB tanggal 14 Januari 2021 tentang Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, maka Kepala Perangkat Daerah
 - a. Diwajibkan untuk menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
 - b. Melaksanakan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026;
 - c. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah 2021-2026; dan
 - d. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan kebutuhan perencanaan dalam SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
 - a. Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara No. 045/1187/BAPP-LIT/GUB Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan

Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renstra Tahun 2021-2026 dan Renja Tahun 2022 dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran serta prioritas daerah, dan perangkat daerah mengusulkan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Renja tahun 2022 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

- b. Penyusunan Rancangan Renstra.
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- d. Perumusan Rancangan Akhir.
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362)
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor No 49 tahun 2020 tentang Tata kelola Mess Badan Penghubung;
19. Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain.
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Utara 2018 Nomor 56);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Dokumen Renstra Badan Penghubung Pemerintah Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud agar memberikan arahan

sekali­gus menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dalam menyusun Renja dan sebagai dasar merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2021 - 2026;
- b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan 2026; Badan Penghubung;
- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Rencana Kerja Tahunan).
- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baik Tahunan maupun lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: (Sistematika disesuaikan dengan lampiran IV permendagri 54 di tahap penyajian)

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM

- 4.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 4.2. Sumber Daya Badan Penghubung
- 4.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
- 4.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Penghubung Provinsi

BAB III. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan isu Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran

BAB V . STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja
- 5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan;

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara awalnya dikenal sebagai Bagian Perwakilan di bentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 01) yang selanjutnya mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara kemudian di ubah lagi sesuai Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain berbentuk Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Tujuan dari perencanaan strategi itu dalam renstra ini sendiri antara lain agar badan penghubung siap dalam menghadapi hambatan atau tantangan di ibukota dan kesempatan yang bisa terjadi setiap waktu. Akan tetapi, untuk mengetahui strategi dan efektivitasnya adalah pekerjaan yang sulit dan tugas yang berat bagi para pimpinan badan penghubung. Sehingga renstra ini akan mendukung mengatasi hambatan dan permasalahan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain, tentang Rincian Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut

- a. Badan Penghubung merupakan unsur pendukung tugas pemerintah provinsi yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, berkoordinasi dengan Biro Umum dan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang kepala kantor yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Utara-Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- c. Badan Penghubung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat Kalimantan Uatara di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII, pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta.
- d. Badan Penghubung mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
 - 2) Penyusunan rencana program kerja Badan Penghubung;
 - 3) Penyelenggaraan kerja sama dibidang hubungan antar lembaga;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta;
 - 5) Pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah;
 - 6) Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - 7) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - 8) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Bagian dan Seksi – Seksi yang berada di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 6 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat diuraikan sebagai berikut; Kepala Badan Penghubung mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Merumuskan, merencanakan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis Subbagian Tata Usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, dan Subbidang Pelayanan berdasarkan rencana strategis agar terwujudnya keterpaduan dan keserasian kerja;
- c. Menyusun pedoman kerja berdasarkan rencana kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai program kerja;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Subbagain dan Subbidang sesuai dengan bidang tugasnya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing subbagian dan subbidang;
- e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan program kegiatan guna terwujudnya keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional badan dengan cara membimbing, mengarahkan, dan mengawasi bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja dengan cara melakukan koordinasi untuk keberhasilan program kegiatan;
- h. Menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan pegawai;
- i. Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi, dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja bawahan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya;

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Subbagian Tata Usaha mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang tugasnya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya agar kegiatan terlaksana sesuai dengan program kerja;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha yang terdiri dari rencana kerja, rumah tangga, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan kehumasan, sesuai dengan bidang tugasnya agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan program;
- e. Melakukan pembinaan bawahan dengan cara mengarahkan dan membimbing sesuai peraturan untuk mengetahui tingkat kinerja bawahan dan untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- g. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kinerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Subbidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis unit;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang tugasnya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya agar kegiatan terlaksana sesuai dengan program kerja;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Hubungan Antara Lembaga yang terdiri dari rencana kerja antar lembaga, bimbingan kemasyarakatan dan fasilitasi serta keprotokolan pejabat baik daerah maupun pusat, agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan program;
- e. Melakukan pembinaan bawahan dengan cara mengarahkan dan membimbing sesuai peraturan untuk mengetahui tingkat kinerja bawahan dan untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Hubungan Antar Lembaga berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- g. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kinerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Subbidang Promosi dan Informasi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang tugasnya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya agar kegiatan terlaksana sesuai dengan program kerja;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Promosi dan Informasi yang terdiri dari promosi dan informasi budaya dan pariwisata, potensi daerah dan informasi pembangunan, penyusunan data dan informasi daerah

serta pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah, agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan program;

- e. Melaksanakan pembinaan bawahan dengan cara mengarahkan dan membimbing sesuai peraturan untuk mengetahui tingkat kinerja bawahan dan untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Promosi dan Informasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- g. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kinerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Subbidang Pelayanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang tugasnya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya agar kegiatan terlaksana sesuai dengan program kerja;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan yang terdiri dari pelayanan pejabat daerah di Jakarta serta pengelolaan Mess, agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan program;
- e. Melakukan pembinaan pegawai dengan cara mengarahkan dan membimbing sesuai peraturan untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai dan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;

- g. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kinerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

2.1.1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara

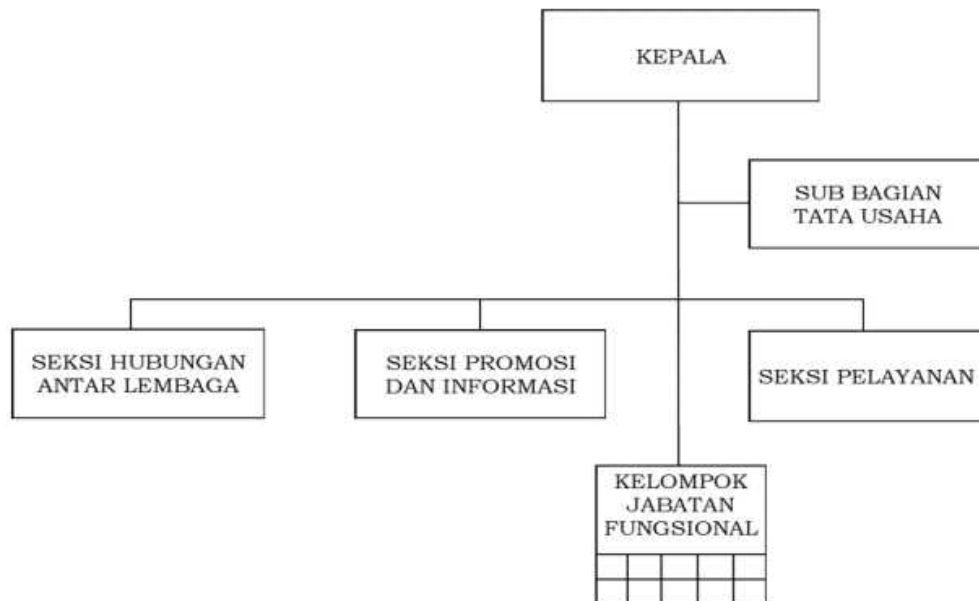
Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara (Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
- e. Sub Bidang Pelayanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan secara diagramatis sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini Badan Penghubung Kalimantan Utara didukung oleh pegawai sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) orang dengan status kepegawaian 28 (Dua Puluh Delapan) orang PNS, dan 57 (Lima Puluh Tujuh) orang Tenaga Kontrak (data per Januari 2021). Adapun pegawai yang ditempatkan di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta dan ada pula yang ditempatkan di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.1

Klasifikasi PNS dan CPNS

**Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan tingkat eselon (Per Januari 2021)**

NO.	ESSELON	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA	KETERANGAN
1.	III A	-	-	-	
2.	IV A	4	-	4	
3.	Non Esselon	17	7	9	
4.	Fungsional	-	-	-	
	JUMLAH	21	7	28	

Berikut ini disajikan data aparatur Badan Penghubung berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS dan CPNS
Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan tingkat Pendidikan (Per Januari 2021)

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA
1.	Doktoral / S-3	-	-	-
2.	Pasca Sarjana / S-2	1		1
3.	Sarjana / S-1	10	3	13
5.	Diploma-III	4	2	6
7.	SLTA	6	2	8
	JUMLAH	21	7	28

(sumber data : Kepegawaian Badan Penghubung Januari 2021)

Tabel 2.3
Klasifikasi PTT
Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan tingkat Pendidikan (Per Januari 2021)

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA
1.	Doktoral / S-3	-	-	-
2.	Pasca Sarjana / S-2			
3.	Sarjana / S-1	1	6	
5.	Diploma-III			
7.	SLTA	35	15	
	JUMLAH	36	21	57

(sumber data : Kepegawaian Badan Penghubung Januari 2021)

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA,
 KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Kebutuhan Pegawai
1	2	3	4	5	6
	Badan Penghubung				
1	Kasubbag Tata Usaha				
2	Bendahara	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
3	Analisis Pengelola Keuangan	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
4	Analisis Perencanaan	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
5	Analisis Barang Milik Negara	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
6	Analisis Notifikasi	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
7	Verifikator Keuangan	Subbagian Tata Usaha	6	1	1
8	Pengadministrasi Keuangan	Subbagian Tata Usaha	5	0	1
9	Pengadministrasi Umum	Subbagian Tata	5	3	4

		Usaha			
10	Pengelola Barang Milik Negara	Subbagian Tata Usaha	6	2	1
11	Petugas Keamanan	Subbagian Tata Usaha	3	0	0
12	Pengadministrasi Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha	5	0	1
13	Kasubid Hubungan Antar Lembaga				
14	Analisis Protokol	Subbidang Hubungan Antar Lembaga	7	1	2
15	Petugas Protokol	Subbidang Hubungan Antar Lembaga	6	0	3
16	Analisis Kerja Sama	Subbidang Hubungan Antar Lembaga	7	2	3
17	Kasubid Promosi dan Informasi				
18	Analisis Data dan Informasi	Subbidang Promosi dan Informasi	7	1	1
19	Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata	Subbidang Promosi dan Informasi	6	2	1
20	Penyusun Promosi dan Kerjasama	Subbidang Promosi dan Informasi	7	0	1
21	Analisis Sistem Informasi	Subbidang Promosi dan Informasi	7	1	1
22	Kasubid Pelayanan dan Mess				
23	Analisis Pelayanan	Subbidang Pelayanan dan Mess	7	1	1
24	Pengolah Data Pelayanan	Subbidang Pelayanan dan Mess	6	0	2
25	Pranata Jamuan	Subbidang Pelayanan dan	5	0	2

		Mess			
26	Pengemudi VIP	Subbidang Pelayanan dan Mess	5	3	3
27	Pengemudi	Subbidang Pelayanan dan Mess	3	0	0
TOTAL				22	33

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Penghubung 2021)

B. Sarana dan Prasarana

Prasarana gedung Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara yang ada saat ini cukup representatif. Ruang kerja yang sangat ideal, gedung kantor sudah memiliki mess operasional provit income, merupakan daya dukung dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara juga membawahi koordinator wilayah Kota Balikpapan dan Kota Tarakan, dan masih berproses menuju kepemilikan resmi Anjungan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.

Sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara antara lain

Tabel 2.3

Sarana Dan Prasarana Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara (PER JANUARI 2021)

No.	Nama	Jumlah Barang	Tahun Pengadaan	Keterangan	Kondisi
1.	Karpet	8	2015	Pinjam Pakai	Baik
2.	Wirelees Amplifier	2 Unit	2015	Pinjam Pakai	Baik
3.	Kursi Sofa	1 Set	2015	Pinjam Pakai	Baik
4.	AC	6 Unit	2015	Pinjam Pakai	Baik
5.	Gordyn	1 Set	2015	Pinjam Pakai	Baik
6.	Wallpaper	1 Paket	2015	Pinjam Pakai	Baik

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2021 - 2026

7.	Kamera	2 Unit	2015	Pinjam Pakai	Baik
8.	CCTV	3 Set	2015	Pinjam Pakai	Baik
9.	Meja Resepsinis	1 Set	2015	Pinjam Pakai	Baik
10.	Tabung Pemadam	20 Buah	2015	Pinjam Pakai	Baik
12.	Lemari	6 Buah	2015	Pinjam Pakai	Baik
13.	Papan Nama (Neon Box)	1 Unit	2015	Pinjam Pakai	Baik
14.	Dispenser	5 Unit	2015	Pinjam Pakai	Baik
15.	Faximili	3 Unit	2015	Pinjam Pakai	Baik
16.	Tiang Bendera	2 Buah	2015	Pinjam Pakai	Baik
17.	Bendara Merah Putih	1 Lembar	2015	Pinjam Pakai	Baik
18.	Bendera Lambang Daerah	1 Lembar	2015	Pinjam Pakai	Baik
19.	Lambang Gurung Garuda	1 Buah	2015	Pinjam Pakai	Baik
20.	Gambar Presiden	1 Buah	2015	Pinjam Pakai	Baik
21.	Gambar Wakil Presiden	1 Buah	2015	Pinjam Pakai	Baik
22.	Brankas	1 Buah	2015	Pinjam Pakai	Baik
23.	Peralatan Makan	1 Paket	2015	Pinjam Pakai	Baik
24.	Pemotong Rumput	1 Unit	2015	Pinjam Pakai	Baik
25.	White Board	2 Buah	2015	Pinjam Pakai	Baik
26.	Jam Dinding	6 Unit	2015	Pinjam Pakai	Baik
27.	Tanaman Hias	1 Paket	2015	Pinjam Pakai	Baik
28.	Penghias Ruangan	1 Paket	2015	Pinjam Pakai	Baik
29.	Lemari 2 Pintu	4 Buah	2014	Pinjam Pakai	Baik
30.	Kursi Kerja (Sandaran Tinggi)	2 Buah	2014	Pinjam Pakai	Baik
31.	Kursi Kerja (sandaran pendek)	10 Buah	2014	Pinjam Pakai	Baik
32.	Kursi Kerja	10 Buah	2014	Pinjam Pakai	Baik

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2021 - 2026

33.	Kursi Kerja Pimpinan	1 Buah	2014	Pinjam Pakai	Baik
34.	Kursi Kerja Staf	4 Buah	2014	Pinjam Pakai	Baik
35.	Meja Samping + Laci	1 Buah	2014	Pinjam Pakai	Baik
36.	Meja Staf	8 Buah	2014	Pinjam Pakai	Baik
37.	Meja	2 Buah	2014	Pinjam Pakai	Baik
38.	AC 1 Pk	2 Unit	2014	Pinjam Pakai	Baik
39.	AC 1,5 Pk	7 Unit	2014	Pinjam Pakai	Baik
40.	Gordyn	1 Set	2014	Pinjam Pakai	Baik
41.	Filling Kabinet	6 Unit	2014	Pinjam Pakai	Baik
42.	Televisi 42"	7 Unit	2014	Pinjam Pakai	Baik
43.	Laptop 14"	3 Unit	2014	Pinjam Pakai	Baik
44.	Mesin Tik Elektrik	3 Unit	2014	Pinjam Pakai	Rusak
45.	Mesin Tik Manual	3 Unit	2014	Pinjam Pakai	Baik
46.	Komputer / Deskbook	3 Unit	2014	Pinjam Pakai	Baik

Sedan	Toyota / Sedan Premium All New Camry 2.5 V A/T	2013	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/OP. WAGUB-TARAKAN ex. KT 1 HU
Sedan	Toyota / Sedan Premium All New Camry 2.5 V A/T	2013	Pembelian	OP. GUBERNUR-JAKARTA) ex. KT 11 HI Plat khusus B 1525 RFK
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / New Kijang Innova G M/T Bensin	2013	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum (PERWAKILAN BALIKPAPAN)
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / New Kijang Innova G M/T Bensin	2013	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum / PERWAKILAN JAKARTA (EX KT 93 HI) Plat Khusus B 1964 RFZ
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / Avanza 1.5 G M/T	2013	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum / PERWAKILAN TARAKAN EX KT 94 HI

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2021 - 2026

kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / New Kijang Innova G M/T Bensin	2013	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/ PERWAKILAN TARAKAN EX KT 66 HI
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / New Kijang Innova G M/T Bensin	2013	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum / PERWAKILAN TARAKAN EX KT 91 HI
Sedan	Toyota / New Corolla Altis 1.8 V A/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum (OP. SEKDA-BALIKPAPAN)
Sedan	Toyota / New Corolla Altis 1.8 V A/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum (OP. SEKDA-JAKARTA) EX KT 66 HK Plat Khusus B 1926 RFZ
Sedan	Toyota / New Corolla Altis 1.8 V A/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum / OP. SEKDA-TARAKAN ex KT 6 HU
Station Wagon	Toyota / New Avanza Velos 1.5 M/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/Banhub Jakarta
Station Wagon	Toyota / New Avanza Velos 1.5 M/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/PERWAKILAN TARAKAN
Station Wagon	Toyota / New Avanza Velos 1.5 M/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum / PERWAKILAN TARAKAN
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / New Kijang Innova G M/T Bensin	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum / PERWAKILAN JAKARTA ex. KT 1137 HI
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / New Kijang Innova G M/T Bensin	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum / PERWAKILAN JAKARTA EX KT 1138 HI
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / Hi ACE Commuter Manual	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/PWK Tarakan ex KT 7002 HI
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / New Kijang Innova G M/T Bensin	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/PERWAKILAN TARAKAN EX KT 98 HI
Sepeda Motor	Honda / Vario Techno 125 Fiiss ACB2J22B03 A/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum di kantor Banhub jakarta

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2021 - 2026

Sepeda Motor	Honda / Vario Techno 125 Fiiss ACB2J22B03 A/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/BANHUB JAKARTA EX 4239 HI
Sepeda Motor	Honda / Vario Techno 125 Fiiss ACB2J22B03 A/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/BANHUB TARAKAN EX KT 4236 HI
Sepeda Motor	Honda / Vario Techno 125 Fiiss ACB2J22B03 A/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/BANHUB TARAKAN EX KT 4237 HI
Sepeda Motor	Honda / Vario Techno 125 Fiiss ACB2J22B03 A/T	2014	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum/BANHUB TARAKAN EX KT 4238 HI
Sedan	Toyota / Alphard 2,5 G A/T	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit mobil Alphard untuk di Tarakan
Sedan	Toyota / Camry Hybrid 2,5 L	2016	Pembelian	Op. Gubernur Jakarta Plat Khusus B 1532 RFW
Sedan	Toyota / Camry Hybrid 2.5 V	2016	Pembelian	Banhub Jakarta EX KT 11 HI Plat Khusus B 1525 RFK
Station Wagon	Toyota / Rush	2016	Pembelian	Pengadaan 2 unit mobil untuk di Balikpapan dan Tarakan
Station Wagon	Toyota / Rush	2016	Pembelian	Pengadaan 2 unit mobil untuk di Balikpapan dan Tarakan
Station Wagon	Toyota / Nav1 A/T Limited Lux	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit mobil Nav1 untuk di Jakarta Plat Khusus B 1965 RFZ
Station Wagon	Toyota / Innova	2016	Pembelian	Innova Operasional Tarakan
Station Wagon	Toyota / Innova	2016	Pembelian	Operasional Tarakan
Station Wagon	Toyota / Innova	2016	Pembelian	Pengadaan mobil Innova untuk di Jakarta/Banhub Jakarta
Station Wagon	Toyota / Innova	2016	Pembelian	Pengadaan mobil Innova untuk di Jakarta/ Banhub Jakarta
Station Wagon	Toyotaa / Rush	2016	Pembelian	Pengadaan mobil Rush untuk di Jakarta / Banhub Jakarta
Station Wagon	Toyotaa / Rush	2016	Pembelian	Pengadaan mobil Rush untuk di Jakata
Station Wagon	Toyota / Innova	2016	Pembelian	
Mini Bus (Penumpang 14	Toyota / Hi Ace	2016	Pembelian	Pengadaan 2 unit mini bus Hi Ace untuk

Orang Kebawah)				di Tarakan
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Hi Ace	2016	Pembelian	Pengadaan mini bus Hi Ace untuk di Tarakan
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Hi Ace	2016	Pembelian	Pengadaan mini bus Hi Ace untuk di Jakarta
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Hi Ace	2016	Pembelian	Pengadaan mini bus Hi Ace untuk di Jakarta
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Alphard 3,5 Q	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit mobil Alphard untuk di Jakarta Plat Khusus B 1927 RFZ
Pick Up	Toyota / Hilux Single Cabin	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit Pick Up Hilux untuk di Tarakan
Sepeda Motor	Yamaha / Aerox	2016	Pembelian	Pengadaan 1 Unit Sepeda Motor di Tarakan
Sepeda Motor	Yamaha / Aerox	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit sepeda motor untuk di Jakarta
Sepeda	-	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit Sepeda Listrik
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Olympia / Manual	2016	Pembelian	Pengadaan 4 unit mesin ketik untuk di Jakarta, Balikpapan dan Tarakan
Lemari Kayu	Kayu	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit lemari kayu untuk di Jakarta
Alat Penghancur Kertas	Ideal / 2245 cc	2016	Pembelian	Pengadaan 3 unit mesing penghancur kertas untuk di Jakarta, Balikpapan dan Tarakan
Alat Kantor Lainnya	Arkadia	2016	Pembelian	Pengadaaan 1 unit meja partisi untuk di Tarakan
Tempat Tidur Kayu	Zakart King Koil	2016	Pembelian	Pengadaan 1 paket tempat tidur (dipan+springbed) digunakan di Jakarta
Meja Tambahan	kayu	2016	Pembelian	Pengadaan 2 buah meja sudut untuk di Jakarta
Meja Tambahan	-	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit meja counsule + cermin untuk di Jakarta
Kasur/Spring Bed	KING KOIL	2016	Pembelian	Pengadaan 2 unit kasur digunakan di Jakarta
Kursi Tamu	Kayu	2016	Pembelian	Pengadaan 10 unit

				kursi tamu untuk di Jakarta
Sofa	Kayu	2016	Pembelian	Pengadaan 2 set sofa untuk di Tarakan
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	2016	Pembelian	Pengadaan 4 unit Vacum Cleaner untuk di Jakarta, Balikpapan dan Tarakan
Lemari Es	Sharp	2016	Pembelian	Pengadaan 2 unit Lemari Es untuk di Tarakan
A.C. Split	LG	2016	Pembelian	Pengadaan AC 2 Unit di penggunaan untuk di Tarakan
A.C. Split	LG	2016	Pembelian	Pengadaan AC 2 Unit di penggunaan untuk di Tarakan
Alat Dapur lainnya	CUSTOM	2016	Pembelian	Pengadaan 1 paket Kapet untuk di Jakarta
Televisi	Panasonic / Viera	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit Televisi untuk di Jakarta
Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2016	Pembelian	Pengadaan 1 Set Gorden untuk di Vip Room Bandara Tarakan
Alat Rumah Tangga Lain-lain	CUSTOM	2016	Pembelian	Pengadaan 1 set gorden untuk di Kantor Tarakan
Alat Rumah Tangga Lain-lain	CUSTOM	2016	Pembelian	Pengadaan 1 set gorden untuk di Jakarta
Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	-	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit meja kerja pimpinan untuk di Jakarta
Meja Tamu Biasa	kayu	2016	Pembelian	Pengadaan 2 unit meja tamu untuk di Jakarta
Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	-	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit kursi kerja untuk di Jakarta
Handy Talky (HT)	Weierwei / UV-3R	2016	Pembelian	Pengadaan 10 unit Handy Talky untuk di Tarakan
Handy Talky (HT)	Weierwei / UV-3R	2016	Pembelian	Pengadaan 10 unit Handy Talky untuk di Jakarta
P.C Unit	Hp Pavilion / 20-2210x GRAPHIS	2016	Pembelian	Pengadaan 4 unit komputer untuk di

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2021 - 2026

				Tarakan
P.C Unit	Hp Pavilion / 20-2210x GRAPHIR	2016	Pembelian	Pengadaan 4 unit komputer untuk di Tarakan
P.C Unit	Hp Pavilion / 20-2210x GRAPHIS	2016	Pembelian	Pengadaan 4 unit komputer untuk di Tarakan
P.C Unit	Hp Pavilion / 20-2210x GRAPHIS	2016	Pembelian	Pengadaan 4 unit komputer untuk di Tarakan
Lap Top	Samsung / Warna Putih RAM 4GB	2016	Pembelian	pengadaan laptop Samsung untuk dipakai di Tarakan
Lap Top	Asus / Core i3	2016	Pembelian	Pengadaan 2 unit Laptop untuk di Tarakan
Lap Top	Lenovo / Ideapad	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit Laptop untuk di Balikpapan
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Epson L- 565	2016	Pembelian	Pengadaan 1 unit Printer
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L-565	2016	Pembelian	Pengadaan 2 unit Printer untuk di Balikpapan
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet M176N	2016	Pembelian	Pengadaan 4 unit Printer untuk di Jakarta
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hp / Laserjet	2016	Pembelian	Pengadaan 4 unit Printer untuk di Jakarta
Stationary Generating Set	WINPOWER / CUMMINS 4BTA3.9G2 SILENT	2017	Pembelian	Belanja Genset pada Badan Penghubung
Station Wagon	Mitsubishi / Pajero Sport Dakkar	2017	Pembelian	Belanja pengadaan mobil lapangan
perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	Toby	2017	Pembelian	1 Set air impact
perkakas bengkel service lainnya (dst)	-	2017	Pembelian	Peralatan pendukung Mesin Kompresor
Lemari Besi/Metal	power	2017	Pembelian	Belanja Brankas pada Badan Penghubung
Lemari Kayu	LOKAL	2017	Pembelian	Belanja Lemari Arsip pada Badan Penghubung
Lemari Kayu	LOKAL	2017	Pembelian	Belanja Lemari pada Badan Penghubung
Lemari Makan	LOKAL	2017	Pembelian	Belanja Lemari dapur
Papan Visual/Papan Nama	MC	2017	Pembelian	Belanja Papan Struktur Organisasi

Mesin Absensi	Solution	2017	Pembelian	Belanja Mesi Absensi /Finger Print pada Badan Penghubung
Meja Rapat	Lokal	2017	Pembelian	Belanja Meja Rapat
Kasur/Spring Bed	Brand Airland Simpati Furnitur / SETSS00318	2017	Pembelian	Belanja Tempat Tidur Lengkap
Meja Makan Besi	LOKAL	2017	Pembelian	Belanja Meja Makan beserta Kursi
Alat Pembersih lainnya	CUSTOM	2017	Pembelian	Pengadaan Tong Sampah pada Badan Penghubung
Lemari Es	Sharp	2017	Pembelian	Belanja Kulkas pada Badan Penghubung
A.C. Split	Panasonic / CP.PN18 SKP	2017	Pembelian	Belanja AC pada Badan Penghubung
A.C. Split	Sharp	2017	Pembelian	Belanja AC pada Badan Penghubung
A.C. Split	Sharp / AH-A18 SEY	2017	Pembelian	Belanja AC Split pada Badan Penghubung
Kompur Listrik (Alat Dapur)	Webber / BI4604B	2017	Pembelian	Pengadaan Kompur Listrik pada Badan Penghubung
Alat Dapur lainnya	Sunnex	2017	Pembelian	Belanja Slow Cooker/ Pemanas Kuah pada Badan Penghubung
Mic Conference	PROFESIONAL/SAMSUNG / LD-1008B/SM558	2017	Pembelian	Belanja Mic Conference pada Badan Penghubung
Alat Rumah Tangga Lain-lain	SILVERSTAR / GORDIN DAN VITRAS	2017	Pembelian	Belanja Gorden pada Badan Penghubung di Jakarta
Alat Rumah Tangga Lain-lain	HAND MADE	2017	Pembelian	Belanja Gorden pada Badan Penghubung di Tarakan
Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	Pembelian	Belanja Meja Kerja pada Badan Penghubung di Tarakan
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	Pembelian	Belanja Kursi Kerja pada Badan Penghubung di Tarakan
Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	-	2017	Pembelian	Belanja Water Heater pada Badan Penghubung
Layar Film/Projector	Epson / EBW04	2017	Pembelian	Belanja Proyektor pada Badan penghubung
Unit Pemancar VHF/FM Stationary	REPIETER VERTEX STANDARD / VXR9000	2017	Pembelian	Belanja Alat Komunikasi Radio pada Badan Penghubung

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2021 - 2026

Air Compressor (Alat Laboratorium Kwalitas Udara)	Shark / 2 HP	2017	Pembelian	
Jeep	TOYOTA / Lexus LX570 4x4 A/T	2018	Pembelian	Mutasi dari Biro Umum / Operasional Gubernur (Jakarta)
Station Wagon	Toyota / New Innova 2,0 Q A/T Venturer	2018	Pembelian	Pengadaan Toyota Innova Venturer AT 2.0 di Tarakan ex KU 1733 GC
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / New Hiace Luxury Vin 2018	2018	Pembelian	Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Hi Ace VVIP pada Badan Penghubung di Tarakan
Pick Up	TOYOTA / NEW HILUX DOUBLE CABIN VIN 2018	2018	Pembelian	Belanja Pengadaan Kendaraan Operasional Sekretariat Anjungan Kaltara di TMII/ Jakarta
Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung / Jakarta
Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung / Jakarta
Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung / Jakarta
Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung / Tarakan
Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung/ Tarakan
Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung / Jakarta
Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung/ Jakarta
Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung / Jakarta
Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung / Jakarta

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2021 - 2026

Sepeda Motor	Yamaha / Lexi Vin 2018	2018	Pembelian	belanja sepeda motor pada Kantor Badan Penghubung / Jakarta
Rak Besi	-	2018	Pembelian	Rekomendasi Inspektorat Th. 2019 Belanja Modal di TMII Jakarta
Meja Rapat	Custom / -	2018	Pembelian	Belanja Pengadaan Meja Rapat
Meja Resepsionis	custom	2018	Pembelian	Rekomendasi Inspektorat th. 2019 Barang Modal di TMII Jakarta
Kursi Rapat	Chitose / Caisar	2018	Pembelian	Belanja Kursi Rapat pada Badan Penghubung di Tarakan
Kursi Putar	Indhachi / D831 CR	2018	Pembelian	Belanja Kursi Kerja pada Badan Penghubung di Tarakan
Bangku Tunggu	-	2018	Pembelian	Rekomendasi Inspektorat Th. 2019 Belanja Modal di TMII
Meubeleur lainnya	Chairman / MC 3105	2018	Pembelian	Belanja Pengadaan Kursi Kerja pada Badan Penghubung di Jakarta
A.C. Split	SHARP / AU-A12UCY	2018	Pembelian	Belanja AC Split pada Badan penghubung di Tarakan
Camera Video	DJI Mavic / Air More Combo	2018	Pembelian	Belanja Kamera pada Badan penghubung
Camera Video	CANON / EOS 77D Kit 1	2018	Pembelian	Belanja Pengadaan Kamera pada Badan Penghubung
Mimbar/Podium	CUSTOM / akrilik 12 mm	2018	Pembelian	Belanja Podium pada Badan Penghubung
Alat Rumah Tangga Lain-lain	hand made / LOKAL	2018	Pembelian	Belanja Modal Gorden
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2018	Pembelian	Rekomendasi Inspektorat Th. 2019 Belanja Modal di TMII Jakarta
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2018	Pembelian	Rekomendasi Inspektorat th. 2019 Belanja Modal TMII Jakarta
Rak Peralatan	CUSTOM / PANEL	2018	Pembelian	Pengadaan Rack power Terminal Panel dan Repiter di Badan Penghubung di Tarakan
peralatan pemancar uhf	-	2018	Pembelian	Belanja Pengadaan Pemancar UHF pada

lainnya (dst)				Badan Penghubung di Tarakan
Lap Top	LENOVO / YOGA 520	2018	Pembelian	PENGADAAN LAPTOP
Lap Top	DELL / Inspiron 14	2018	Pembelian	Belanja Laptop pada Badan Penghubung
Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L380	2018	Pembelian	Belanja Printer pada Badan Penghubung
Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L360	2018	Pembelian	PENGADAAN PRINTER
Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / LX310	2018	Pembelian	PENGADAAN PRINTER
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L360	2018	Pembelian	Belanja Printer pada Badan Penghubung di Tarakan
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LX 310	2018	Pembelian	Belanja Printer pada Badan Penghubung di Tarakan
Station Wagon	TOYOTA / NEW RUSH 1,5 G A/T VIN 2018	2019	Pembelian	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA BADAN PENGHUBUNG DI JAKARTA TAHUN 2019
Mesin Absensi	SOLT / X105	2019	Pembelian	Mesin Absensi di Badan Penghubung Jakarta
Sofa	Custom	2019	Pembelian	Belanja Pengadaan Mebeleur di Banhub Tdi Tarakan
Baggage Trolley	trolley lokal	2020	Pembelian	
Meja Dorong Saji/Trolley Saji	trolley MUTU / RST 3	2020	Pembelian	
Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	carbon brush motor	2020	Pembelian	Pembelian Mesin Cuci Kendaraan / Car Washer di Badan Penghubung di Jakarta
LCD Projector/Infocus	in focus lcd View Sonic / PG 703 W	2020	Pembelian	
LCD Projector/Infocus	Infocus / IN1118HD	2020	Pembelian	
LCD Projector/Infocus	EPSON in focus / EB-U42	2020	Pembelian	Pengadaan proyektor pada Badan Penghubung di Jakarta
Kasur/Spring Bed	Comforta / Fantasia	2020	Pembelian	
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Vacum Cleaner BOSCH / GAS	2020	Pembelian	Pembelian Vacum Cleaner utk Badan Penghubung di Jakarta

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2021 - 2026

Mesin Cuci	Mesin cuci Electrolux / EWF9023BDWA	2020	Pembelian	
Lemari Es	Electrolux kulkas / ETB 250H-AETB 250H-A	2020	Pembelian	
Lemari Es	kulkas AQUA / AQF-S6 (DS)	2020	Pembelian	Pengadaan Kulkas merk Aqua AQF pada Badan Penghubung di Jakarta
Kompore Gas (Alat Dapur)	kompore Electrolux	2020	Pembelian	
Blender	Vicenza / VT 337	2020	Pembelian	
Dispenser	dispenser SANKEN / HWD-C520IC	2020	Pembelian	
Coffee Maker	penggiling kopi Nespresso / Inissia C40 EU2 Red Nespresso	2020	Pembelian	
Microwave Oven	oven Modena / MV 3116	2020	Pembelian	
P.C Unit	pc DELL / OPTIPLEX 7470	2020	Pembelian	
Lap Top	laptop Lenovo / Legion 5i	2020	Pembelian	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2020	Pembelian	PENGADAAN ALAT CETAK /PRINTER PADA BADAN PENGHUBUNG DI JAKARTA
Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Chitos	2017	Pembelian	Belanja Kursi Rapat pada Badan Penghubung di Tarakan
Alat Dapur lainnya	-	2018	Pembelian	Pengadaan Alat Rumah tangga pada Badan Penghubung (Mess) Jakarta
Alat Dapur lainnya	-	2018	Pembelian	Belanja Alat Dapur pada Badan Penghubung (mess) Jakarta
Alat Dapur lainnya	-	2018	Pembelian	Belanja Alat Dapur pada Badan Penghubung (Mess) di Tarakan
Papan Nama Instansi	-	2019	Pembelian	Papan Struktur Banhub Jakarta
Lemari Kayu	PRO DESIGN / rom rowd 3	2020	Pembelian	
Lemari Kayu	PRO DESIGN / ROMA ROWD 3	2020	Pembelian	
Teko Listrik	teko listrik Sigma / BPS 1400	2020	Pembelian	

(Sumber : Kartu Inventaris Barang Badan Penghubung 2021)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Data Anggaran Realisasi Tahun Lalu bahwa kegiatan badan penghubung berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini menjadi acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja badan penghubung dimasa yang akan dating.

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung

Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Pada					Rasio Capaian Pada				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.				100	150	150	150	150	-	80%	82,95%	85,76	n/a
2	Promosi dan pengelolaan Ajungan Kalimantan Utara di TMII				3	6	10	12	12	-	52,3%	78,45	91,84	n/a
3	Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (pelayanan mess)				20	40	60	60	100	-	90,46%	86,74	78,08	n/a

Sumber : Database Sub.Bagian Perencanaan Badan Penghubung Prov. Kaltara Tahun 2020

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Utara (Tahun 2017-2020)

Uraian	Anggaran (Rp.)					Realisasi Capaian (Rp.)					Rasio Capaian					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	A n g g a r a n	R e a l i s a s i
Belanja Tidak Langsung	4.141.140.299	5.473.354.891	3.343.586.574	2.827.747.188	15.822.992.152	3.552.863.144	4.142.896.515	4.142.896.515	2.649.363.756		85,79 %	75,69 %	94%	93,69 %			
Belanja Langsung	19.174.963.246	17.021.373.377	10.005.888.828	11.161.314.975		14.167.264.113	13.493.757.916	9.534.291.866	10.101.017.181		73,88 %	79.28	95.00 %	81.32 %			

Sumber : Database Sub.Bagian Perencanaan Badan Penghubung Prov. Kaltara Tahun 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan (*Threats*)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- a. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah
- b. Beberapa Kab/Kota juga memiliki perwakilan (Badan) sehingga eksistensi Badan Penghubung menjadi berkurang
- c. Dinamika sosial politik
- d. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Institusi Pemerintah yang semakin tinggi;
- e. Keterbukaan Informasi Publik menuntut informasi Potensi Daerah yang akurat dan transparan;
- f. Semakin besarnya peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota sebagai bentuk peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

2.4.2 Peluang (*Opportunities*)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat. Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut adalah:

- b. Kondisi letak yang strategis memudahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, baik dengan Pemerintah Pusat, Kementrian dan Lembaga yang ada di Jakarta maupun dengan perantau Minang di Indonesia;

- c. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi;
- e. Semakin tingginya frekwensi kunjungan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara ke Jakarta untuk berbagai urusan dan kegiatan.
- f. Banyaknya event-event baik pusat maupun daerah yang membutuhkan dukungan fasilitasi Badan Penghubung.
- g. Adanya kesempatan dan minat swasta maupun lembaga lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Perlunya peningkatan hubungan kerja dan kemitraan antar Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dengan Badan Penghubung 34 Provinsi serta berbagai lembaga pemerintahan dan non pemerintahan
- i. Tersedianya Dukungan Kepala Daerah.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya pemahaman aparaturnya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung	1. Belum tersedia informasi yang luas terkait badan penghubung	1. Regulasi yang mendasari penyelenggaraan pelayanan perwakilan dan administrasi perkantoran belum memadai; 2. Adanya 3 lokasi terpisah badan penghubung yaitu Tarakan, Balikpapan dan Jakarta.
		3. Terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur/pegawai yang memahami	1. Banyak kualifikasi prlaksana dalam bidang tertentu masih kekurangan SDM seperti di kasi Hubungna Antar Lembaga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		peraturan-peraturan menyangkut pengelolaan keuangan daerah, fasilitasi keprotokolan, peraturan-peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pengoperasian komputer serta minimnya jumlah SDM yang menangani kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Program;	2. Pendidikan SDM Perhotelan untuk tenaga MESS masih kekurangan 3. Jumlah SDM yang memahami peraturan atau perda penginapan juga masih rendah 4. Koordinasi dengan beberapa kementerian/pemerintah pusat/lembaga non kementerian berjalan kurang baik, karena kementerian/lembaga non kementerian mengharapkan Pemda diwakili oleh pejabat yang memiliki kewenangan/kebijakan setingkat eselon II;
2	a. Koordinasi dengan beberapa kementerian/pemerintah	1. Informasi dari kementerian masih lambat diterima atau terkena regulasi	1. Belum adanya kesiapan aparatur untuk berkomunikasi keatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	ntah pusat/lembaga non kementerian berjalan kurang baik, karena kementerian/ lembaga non kementerian mengharapkan Pemda diwakili oleh pejabat yang memiliki kewenangan/ kebijakan setingkat eselon II;	2. Belum maksimalnya keprotokolan yang dimiliki aparatur badan penghubung	1. Belum dilakukan pelatihan/pendidikan protokoler bagi pegawai badan penghubung 2. Masih belum maksimalnya kualitas pelayanan kantor mess karena terbetur peraturan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.2.1 Visi

Sesuai dengan pedoman pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara No. 045/1187/BAPP-LIT/GUB Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka Perangkat

Daerah menyusun Renstra tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dilantik serta prioritas daerah. Dengan demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2021-2026, adalah :

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Posisi Visi untuk tahun 2021-2026 atau jangka menengah ini, dalam skenario jangka panjang nasional 2005-2025, berada pada periode RPJM Nasional tahapan ke III (2016-2019) yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke II. Dinyatakan dalam RPJPN, tahapan periode pembangunan ke III ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Beberapa butir arahan lainnya berupa upaya untuk mewujudkan kondisi aman dan damai yang makin mantap; kehidupan yang makin demokratis; memantapkan kesadaran dan penegakan hukum; meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk kualitas sumber daya manusia; memantapkan pembangunan berkelanjutan; menguatkan daya saing perekonomian; meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang termasuk pengembangan infrastruktur perdesaan.

Mempertimbangkan beberapa butir penting tersebut maka pernyataan visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berubah:** Inti dari bagian visi berubah adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang berubah maju.

Berubah yaitu suatu kondisi kehidupan ada pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara

pemerintah, masyarakat dan swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara mandiri.

- b. Maju** yaitu suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.
- c. Sejahtera** yaitu suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan pembangunan.

3.2.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, *ada 14 misi* yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yaitu:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai.
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan Kebangsaan.
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinnekaan di provinsi Kalimantan Utara.
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.

9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan.
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa tidak keterhubungan dengan kementerian/lembaga terkait maka tidak disertakan Telaahan Renstra kementerian / lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa tidak bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka tidak disertakan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan prima, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu didukung oleh sarana dan prasarana dan sumber daya aparatur yang mumpuni, menguasai iptek dan mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dinas sehari-harinya. Sehingga Badan Penghubung lebih mampu menempatkan diri baik dalam mengkoordinasikan tugas – tugas pemerintahan daerah maupun dalam memberi pelayanan terhadap Pejabat VIP / pejabat – pejabat lain lingkup Propinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara dan sebagai pelayan masyarakat.

Beberapa isu strategis yang dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memberikan pelayanan prima pada saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tuntutan terhadap pelayanan Badan Penghubung yang berkualitas.
- b. Harapan terhadap kualitas Informasi Publik yang akurat dan transparan;
- c. Terbangunnya peran serta semua stakeholder dalam melaksanakan Tupoksi Badan Penghubung.
- d. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM dalam menghadapi revolusi industri 4.0;
- e. Pandemi Covid-19;
- f. Optimalisasi tatakelola dan pelayanan dan fasilitasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Badan Penghubung Pemerintah Kalimantan Utara, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Mempromosikan kepada investor baik dalam maupun luar negeri.
- b. Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat

Sasaran

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran yang ingin di capai dalam periode waktu 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kepada pemangku kepentingan sesuai tupoksi Badan Penghubung.
- b. Terfasilitasinya kepentingan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah;
- c. Terlaksananya promosi potensi daerah Kalimantan Utara;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, transparan dan partisipatif;
- e. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada pimpinan daerah selama pelaksanaan tugas di luar Kalimantan Utara.

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target awal	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Target	Target	target	target	target	target	target
-1	-2	-3			-4	-5	-6	-7	-8
Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan/fasilitasi kepada unsur pemerintahan, pimpinan, pejabat eksekutif/legislatif Kalimantan Utara di Jakarta	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess, penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung		80%	80%	80%	85%	90%	95%
Meningkatkan pelayanan di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).	Meningkatkan pengelolaan promosi daerah, potensi UKM, potensi seni budaya Kalimantan Utara di Jakarta	Prosentase kepuasan pengunjung atas promosi, potensi UKM, dan pentas seni			80%	82%	85%	90%	95%

	dan sekitarnya.	budaya Kalimantan Utara							
--	--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Kebijakan

Strategi

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi tujuan dan sasaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi dihasilkan dari langkah-langkah strategis yang akan diambil dari hasil analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Adapun strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut;

- a. Optimalisasi pelayanan prima
- b. Peningkatan promosi dan pengelolaan anjungan Kalimantan Utara di TMII

Kebijakan

Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, maka kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tujuan dan sasaran serta strategis yang telah ditetapkan lebih difokuskan kepada pelaksanaan kegiatan pendamping/fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di luar ibu Kota Provinsi meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mendukung tertib administrasi

- b. Menerapkan SOP teknis maupun administrasi
- c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Badan Penghubung
- e. Meningkatkan promosi dan pengelolaan anjungan Kalimantan Utara di TMII dan potensi lainnya

Tabel 5.1**Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kepada pemangku kepentingan sesuai tupoksi Badan Penghubung	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess, penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, dan pembinaan masyarakat masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta	1. Indeks kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mendukung tertib administrasi
			2. Menerapkan SOP teknis maupun administrasi
			3. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana
			4. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Badan Penghubung
	2. Meningkatnya promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	2. Cakupan promosi daerah dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	5. Melaksanakan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perwakilan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026, ditetapkan 6 (enam) Program Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, yaitu :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Mebel

b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

c. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

- Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
 - Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
 - Peningkatan fasilitasi promosi Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

5.2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi, untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan Indikator kinerja berupa suatu ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara adalah Pejabat Pusat, Daerah Tamu Penting Lainnya dan masyarakat/Kelompok organisasi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada rencana Program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara tertuang dalam Tabel 5.

Tabel 6.1

Program dan Kegiatan Badan Penghubung untuk periode Tahun 2021-2026

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan keterpaduan dengan dokumen rencana daerah Provinsi Kalimantan Utara. Keterpaduan dokumen dapat dilihat pada kesesuaian tujuan, sasaran, visi dan misi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara.

Indikator kinerja Perangkat Daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif/kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil/dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja, sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan maka cakupan indikator kinerja Kantor Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk melakukan Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi dan Program Peningkatan Manajemen Kerja dalam rangka Meningkatkan kualitas layanan dan fasilitasi pelayanan prima.

Indikator kinerja prioritas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan sebagai berikut.

Pada Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi, ada 3 Kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran untuk Meningkatnya kualitas layanan dan fasilitasi pelayanan sesuai tupoksi Badan Penghubung, maka kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD diharapkan sebanyak 96 % Persentase informasi provinsi yang terpublikasi di ibukota negara. Untuk Program Program Peningkatan Manajemen Kerja, ada 3 kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya kualitas layanan dan fasilitasi pelayanan sesuai tupoksi Badan Penghubung, dan diharapkan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebanyak lebih dari 90% pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asistensi, staf ahli dan tamu penting lainnya di luar ibukota provinsi.

Untuk melihat indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara tersebut dijabarkan sesuai tabel 6.1

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peresentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80		70%	75%	80%	90%	90%
2	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80		85%	85%	90%	95%	95%
3	Prosentase aparatur yang memenuhi standar kedisiplinan	80		85%	90%	95%	100%	100%
4	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70		75%	80%	80%	85%	85%
5	Prosentase kegiatan pelayanan pejabat daerah tamu penting lainnya, penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara yang terlayani	90		85%	85%	95%	95%	95%
6	Persentase informasi provinsi yang terpublikasi di ibukota negara	50		75%	85%	85%	85%	85%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra ini disusun dengan tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebagai rangkaian dari sistem perencanaan pembangunan, untuk itu perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan capaian kinerja yang baik dan terukur, oleh karena itu Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang diarahkan pada dukungan teknis administrasi dan operasional terhadap Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan fasilitasi pelayanan prima terhadap pejabat pusat, daerah tamu penting lainnya dan masyarakat, maka diperlukan kesadaran, kerja keras serta pengabdian dalam melaksanakan program maupun kegiatan secara kontinyu yang dituangkan didalam Renstra ini sebagai bentuk kontribusi maupun tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di Kalimantan Utara yang berkesinambungan.

Rencana Strategis ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Kantor Badan Penghubung Kalimantan Utara. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan

dapat terwujud. Renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Jakarta, Mei 2021
Plt. Kepala Badan Penghubung,

ttd

Didik Supriydi, A.Md
NIP. 197209181993021001

Tabel 6.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian padaTahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan/ fasilitasi kepada unsur pemerintah, pimpinan, pejabat eksekutif/ legislatif kalimantan Utara di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess, penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	0	85%	936,300,000.00	87%	986,500,000.00	75%	1,050,601,006.00	80%	1,183,101,006.00	90%	
			5.07.01.1.06	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	-	12 bulan	397,500,000	12 bulan	409,500,000	12 bulan	417,500,000	12 bulan	418,000,000	12 bulan
			5.07.01.1.06	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12 bulan	98,000,000	12 bulan	113,000,000	12 bulan	114,301,006	12 bulan	115,301,006	12 bulan
			5.06.01.1.06	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	15	20 dok	15,800,000	20 dok	17,000,000	20 dok	18,800,000	20 dok	19,800,000	20 dok
			5.07.01.1.06	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan kantor yang disediakan	20	20 pealatan	75,000,000	20 pealatan	77,000,000	20 pealatan	80,000,000	20 pealatan	100,000,000	20 pealatan
			5.07.01.1.06	5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	10 peralatan	100,000,000	10 peralatan	110,000,000	10 peralatan	120,000,000	10 peralatan	130,000,000	10 peralatan
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	42	45 kali	250,000,000	45 kali	260,000,000	45 kali	300,000,000	45 kali	400,000,000	45 kali
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	85%	2,237,515,253	87%	2,372,000,000	88%	2,482,515,253	89%	2,580,000,000	90%	
			5.07.01.1.08	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan / waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	12 bulan	700,000,000	12 bulan	710,000,000	12 bulan	725,000,000	12 bulan	750,000,000	12 bulan
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20	25 unit	1,337,515,253	25 unit	1,452,000,000	25 unit	1,537,515,253	25 unit	1,600,000,000	25 unit
			5.07.01.1.08	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	12 bulan	200,000,000	12 bulan	210,000,000	12 bulan	220,000,000	12 bulan	230,000,000	12 bulan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	85%	3,050,992,000.00	87%	3,145,000,000.00	89%	3,260,992,000.00	90%	3,463,992,000.00	92%	
			5.07.01.1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12	12 bulan	2,840,582,000	12 bulan	2,920,000,000	12 bulan	3,040,582,000	12 bulan	3,240,582,000	12 bulan
			5.07.01.1.09	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang diperbaiki	20	25 unit	135,410,000	25 unit	140,000,000	25 unit	145,410,000	25 unit	147,410,000	25 unit
			5.07.01.1.09	3	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebeleur yang dipelihara	-	10 unit	75,000,000	10 unit	85,000,000	10 unit	75,000,000	10 unit	76,000,000	10 unit
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase koordinasi konsultasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	85%	60,966,000.00	87%	89,856,000.00	89%	92,176,006.00	90%	113,676,006.00	92%	
			5.07.01.1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	-	5 dokumen	30,000,000	5 dokumen	58,150,000	5 dokumen	59,870,006	5 dokumen	80,870,006	5 dokumen
			5.07.01.1.01	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-	2 dokumen	4,567,000	2 dokumen	4,567,000	2 dokumen	4,567,000	2 dokumen	4,567,000	2 dokumen
			5.07.01.1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	koordinasi dan jumlah penyusunan dokumen	-	2 dokumen	6,667,000	2 dokumen	6,767,000	2 dokumen	6,867,000	2 dokumen	6,967,000	2 dokumen
			5.07.01.1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	koordinasi dan jumlah penyusunan dokumen	-	2 dokumen	5,435,000	2 dokumen	5,535,000	2 dokumen	5,635,000	2 dokumen	5,735,000	2 dokumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			5.07.01.1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	koordinasi dan jumlah penyusunan dokumen	-	2 dokumen	2,195,000	2 dokumen	2,295,000	2 dokumen	2,395,000	2 dokumen	2,495,000	2 dokumen
			5.07.01.1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	koordinasi dan jumlah penyusunan dokumen	-	1 dokumen	5,435,000	1 dokumen	5,535,000	1 dokumen	5,635,000	1 dokumen	5,735,000	1 dokumen
			5.07.01.1.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	koordinasi dan jumlah penyusunan dokumen	-	1 dokumen	6,667,000	1 dokumen	7,007,000	1 dokumen	7,207,000	1 dokumen	7,307,000	1 dokumen
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penggunaan anggaran administrasi pegawai perangkat daerah.		95%	3,302,929,322	96%	3,333,200,000	97%	3,579,880,000	97%	3,723,439,055	98%
			5.07.01.1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	13	12 bulan	3,053,449,322	12 bulan	3,060,000,000	12 bulan	3,300,000,000	12 bulan	3,441,359,055	12 bulan
			5.07.01.1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan administrasi bagi ASN	12	12 bulan	228,480,000	12 bulan	250,000,000	12 bulan	255,480,000	12 bulan	256,480,000	12 bulan
			5.07.01.1.02	3	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pelaksanaan	Jumlah dokumen verifikasi	-	4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	17,000,000	4 dokumen	18,000,000	4 dokumen	19,000,000	4 dokumen
			5.07.01.1.02	4	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen pemeriksaan	-	3 dokumen	3,000,000	3 dokumen	3,100,000	3 dokumen	3,200,000	3 dokumen	3,300,000	3 dokumen
			5.07.01.1.02	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen koordinasi	-	2 dokumen	3,000,000	2 dokumen	3,100,000	2 dokumen	3,200,000	2 dokumen	3,300,000	2 dokumen
					Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan		80%	175,000,000	82%	187,000,000	84%	200,000,000	86%	247,000,000	88%
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bimbingan teknis	-	24 kali	50,000,000	24 kali	55,000,000	24 kali	60,000,000	24 kali	100,000,000	24 kali
				2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen kepegawaian	-	10 dokumen	25,000,000	10 dokumen	27,000,000	10 dokumen	30,000,000	10 dokumen	32,000,000	10 dokumen
			5.07.01.1.06.02	3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah stel pakaian dinas	-	100 stel	100,000,000	100 stel	105,000,000	100 stel	110,000,000	100 stel	115,000,000	100 stel
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase cakupan layanan administrasi perangkat daerah		85%	114,500,000.00	87%	125,000,000.00	89%	132,500,000.00	90%	138,500,000.00	92%
			5.07.01.1.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	20	20 unit	60,000,000	20 unit	65,000,000	20 unit	70,000,000	20 unit	75,000,000	20 unit
			5.07.01.1.06.02	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20	25 unit	54,500,000	25 unit	60,000,000	25 unit	62,500,000	25 unit	63,500,000	25 unit
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercapainya urusan penunjang perangkat daerah		85%	566,134,000	87%	576,134,000	89%	586,134,000	92%	596,134,000	93%
			5.07.01.1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	100	100 lembar	325,000,000	100 lembar	327,000,000	100 lembar	330,000,000	100 lembar	350,000,000	100 lembar
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan barang perangkat daerah		85%	660,150,000	87%	672,000,000	88%	700,150,000	89%	790,000,000	92%
			5.07.01.1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan	12	12 bulan	400,000,000	12 bulan	410,000,000	12 bulan	420,000,000	12 bulan	440,000,000	12 bulan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian padaTahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3(2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5(2026)	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			5.07.01.1.09	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/bangunan	12	12 bulan	260,150,000	12 bulan	262,000,000	12 bulan	280,150,000	12 bulan	350,000,000	12 bulan
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		85%	525,000,000	85%	377,000,000	86%	477,000,000	87%	250,000,000	88%
				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	3	5 unit	75,000,000.00	5 unit	76,000,000.00	5 unit	85,000,000.00	5 unit	120,000,000.00	5 unit
			5.07.01.1.07	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit yang diadakan	-	1 unit	400,000,000.00	1 unit	-	1 unit	340,000,000.00	1 unit	0	1 unit
			5.06.01.03.21	3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit yang diadakan	-	1 unit	0	1 unit	250,000,000.00	1 unit	0	1 unit	0	1 unit
			5.06.01.07.05	4	Pengadaan Mebel	jumlah mebeleur yang diadakan	-	3 unit	50,000,000.00	3 unit	51,000,000.00	3 unit	52,000,000.00	3 unit	130,000,000.00	3 unit
					Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai standar aturan/SOP		85%	4,238,614,944.00	87%	4,467,806,734.00	89%	4,639,139,923.00	90%	4,903,184,000.00	92%
			5.07.02.1.01	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah pelayanan bagi aparatur dan masyarakat	157	150 kali	1,800,000,000	150 kali	1,953,806,734	150 kali	2,100,000,000	150 kali	2,200,000,000	150 kali
			5.07.02.1.01	2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah pelayanan bagi aparatur dan masyarakat	65	100 orang	2,131,385,056	100 orang	2,200,000,000	100 orang	2,250,000,000	100 orang	2,403,184,000	100 orang
	Meningkatnya pengelolaan promosi daerah, potensi UKM,pentas seni budaya Kalimantan Utara di Jakarta dan sekitarnya.	Prosentase kepuasan pengunjung atas promosi,potensi UKM, dan pentas seni budaya Kalimantan Utara	5.07.02.1.01	3	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah pameran produk seni budaya	10	12 kali	100,000,000	12 kali	102,000,000	12 kali	103,000,000	12 kali	120,000,000	12 kali
			5.07.02.1.01	4	Peningkatan fasilitasi promosi Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	jumlah kegiatan fasilitasi produk unggulan seni budaya	3	3 kegiatan	70,000,000.00	3 kegiatan	72,000,000.00	3 kegiatan	73,000,000.00	3 kegiatan	80,000,000.00	3 kegiatan
			5.07.02.1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	jumlah koordinasi pelayanan badan penghubung	-	3 kegiatan	137,229,888.00	3 kegiatan	140,000,000.00	3 kegiatan	113,139,923.00	3 kegiatan	100,000,000.00	3 kegiatan
								15,868,101,519.00		16,331,496,734.00		17,201,088,188.00		17,989,026,067.00		

hun-5(2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
Rp	target	Rp
-17	-18	-19
1,219,601,006.00	90%	5,376,103,018.00
437,500,000	12 bulan	2,080,000,000.00
116,301,006	12 bulan	556,903,018.00
20,800,000	20 dok	92,200,000.00
85,000,000	20 pealatan	417,000,000.00
140,000,000	10 peralatan	600,000,000.00
420,000,000	45 kali	1,630,000,000.00
3,407,515,253	92%	13,079,545,759
1,430,000,000	12 bulan	4,315,000,000.00
1,737,515,253	25 unit	7,664,545,759.00
240,000,000	12 bulan	1,100,000,000.00
3,465,992,000.00	93%	16,000,968,000.00
3,240,582,000	12 bulan	15,282,328,000.00
150,410,000	25 unit	718,640,000.00
75,000,000	10 unit	386,000,000.00
116,276,006.00	95%	472,950,018.00
82,870,006	5 dokumen	311,760,018.00
4,567,000	2 dokumen	22,835,000.00
7,067,000	2 dokumen	34,335,000.00
5,835,000	2 dokumen	28,175,000.00

hun-5(2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
Rp	target	Rp
-17	-18	-19
2,595,000	2 dokumen	11,975,000.00
5,835,000	1 dokumen	28,175,000.00
7,507,000	1 dokumen	35,695,000.00
3,708,141,538	98%	17,647,589,915
3,420,861,538	12 bulan	16,275,669,915.00
260,480,000	12 bulan	1,250,920,000.00
20,000,000	4 dokumen	89,000,000.00
3,400,000	3 dokumen	16,000,000.00
3,400,000	2 dokumen	16,000,000.00
238,000,000	90%	492,000,000
80,000,000	24 kali	345,000,000.00
33,000,000	10 dokumen	147,000,000.00
125,000,000	100 stel	555,000,000.00
141,500,000.00	93%	652,000,000.00
77,000,000	20 unit	347,000,000.00
64,500,000	25 unit	305,000,000.00
600,134,000	95%	610,134,000
600,134,000	100 lembar	1,932,134,000.00
735,150,000	93%	3,557,450,000
440,000,000	12 bulan	2,110,000,000.00

hun-5(2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
Rp	target	Rp
-17	-18	-19
295,150,000	12 bulan	1,447,450,000.00
235,000,000	90%	451,000,000
95,000,000.00	5 unit	451,000,000.00
0	1 unit	740,000,000.00
0	1 unit	250,000,000.00
140,000,000.00	3 unit	423,000,000.00
5,044,477,661.00	93%	23,293,223,262.00
2,250,000,000	150 kali	10,303,806,734.00
2,450,000,000	100 orang	11,434,569,056.00
122,000,000	12 kali	547,000,000.00
81,000,000.00	3 kegiatan	376,000,000.00
141,477,661.00	3 kegiatan	631,847,472.00
18,911,787,464.00		